

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN SINJAI**

**Oleh:**  
**Usnida Umar**  
**Dosen STISIP Muhammadiyah Sinjai**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sinjai. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan dukungan data primer dan data sekunder (*Time Series* 1999-2010). Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode *Two-stage Least Squares Analysis* dengan pengolahan data SPSS versi 16.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai.

**Kata Kunci : PAD, DAU, DAK DAN IPM**

**Abstract**

The aim of the research is to analyze to what extent the influence of Regional Original Revenue, Public Allocation Fund, Special Allocation Fund on Economic growth and human development indeks in Sinjai Regency. The methods of obtaining the were observation, interviews, and documentation supported by secondary data i.e. time Series 2005 to 2009 Per semester. The data were methods Two-stage Least Squares analyzed by using regression analysis with data processing of SPSS version 16.0S.

The results of the research reveal that Regional Original Revenue, Public Allocation Fund, and Special Allocation Fund have a positive and Significant influence on economic growth, Similarly, public Allocation Fund has a positive and significant influence on the Human Development Index. On the other hand, Regional Original Revenue, Special Allocation Fund and Economic Growth have a positive insignificant influence on Human Development Indeks in Sinjai Regency.

**Keyword : Regional Original Revenue, Public Allocation Fund, Special Allocation Fund, Human Development Index**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22/1999 (UU RI) tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah, namun efektif diberlakukan awal tahun 2001 (UU ini dalam perkembangannya diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004). Dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi, penyelenggaraan pemerintah pusat, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*, yaitu prinsip dimana fungsi-fungsi ditentukan terlebih dahulu, barulah ditetapkan besarnya kebutuhan keuangan bagi pelaksanaan urusan bersangkuta.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana perimbangan yang berasal dari APBN untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai

kebutuhan pembelanjaan. Namun demikian penggunaannya harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Peningkatan pelayanan sektor publik yang berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya.

Fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat daerah dari sisi penerimaan terdapat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana perimbangan di banding PAD, bila dilihat dari struktur APBD Kab. Sinjai selama lima tahun terakhir, rata-rata belanja daerah dibiayai 82,2 persen dari dana transfer dan 7,3 % dibiayai oleh PAD, kemampuan fiskal Kabupaten Sinjai akan sangat menentukan keberhasilannya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan publik dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasio-

nal. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional.

Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai sebagai daerah otonomi perlu memperkuat basis PAD. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif, salah satu komponen yang diandalkan dan merupakan variabel yang signifikan adalah DAU untuk belanja modal dan PAD, ini sejalan dengan Brata (2004), menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Selanjutnya disajikan pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK dan IPM selama tahun 2005-2009 di Kabupaten Sinjai.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2009.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah Tahun (PAD) Rp.	Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp.	PE	IPM
2005	11.724.573.896,-	145.522.000.000,-	24.977.637.320,-	796.685,06	67,1
2006	17.090.905.370,-	284.703.000.000,-	65.640.000.000,-	845.346,61	67,5
2007	17.045.306.351,-	255.440.000.000,-	50.563.800.000,-	891.286,41	68,3
2008	16.811.890.013,-	284.001.898.000,-	61.839.000.000,-	957.712,93	68,7
2009	12.347.866.000,-	288.763.346.000,-	52.737.000.000,-	1.024.917,04	69,2

Sumber : BPS Kab.Sinjai 2005-2009

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan dari tahun 2005-2007 dan mengalami penurunan tahun 2008 -2009, dengan rata-rata pertumbuhan 2005-

2007 sebesar 4,6 %. Dana Alokasi Umum terutama Tahun 2005-2009 memperlihatkan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. PAD walaupun sempat menga-

lami penurunan ditahun 2005 sebesar -2,59 % namun tahun 2006-2007 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, besarnya proporsi DAU dibanding PAD memberikan satu petunjuk bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh posisi anggaran pemerintah pusat.

Bila mana dihubungkan kolom 1 dan 2, terlihat dengan jelas bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), PDRB terus mengalami kenaikan kenaikan selama Tahun 2005-2008, sementara pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi atau naik turun. Dari uraian dan data tersebut tercermin suatu kondisi yang menggambarkan adanya indikasi perkembangan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya meningkat, namun tidak diiringi oleh Pendapatan Asli Daerah yang sepadan, realisasi tersebut menarik untuk diteliti.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, diformulasikan rumusan masalah sebagai berikut: "Apakah PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi".

## **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah "Untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi. Manfaat penelitian teoritis yang diharapkan ini adalah menambah khasanah pengembangan ilmu-ilmu manajemen keuangan daerah baik dalam kajian empiris maupun dan sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi atau peneliti lainnya yang akan meneliti lebih mendalam tentang PAD dan DAU dan DAK

pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sinjai. Manfaat penelitian Praktikal yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sinjai dan DPRD untuk mengevaluasi pemanfaatan DAU dalam Optimalisasi pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Indeks PerumbuhanManusia serta bahan masukan bagi Instansi Lintas Sektoral dalam mengoptimalkan pemanfaatan PAD, DAU dan DAK sesuai Peruntukannya agar tujuan dan sasaran dari PAD, DAU dan DAK tersebut tercapai.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Halim 2002, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- a. Pajak Daerah, merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari pajak.
- b. Retribusi daerah, merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah berdasarkan UU No 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi 3 yaitu:
  - 1) Pajak Propinsi, terdiri atas: (i) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (ii) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, (iii) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (iv) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

- 2) Jenis pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
    - (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak Penerangan Jalan, (vi) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, (vii) Pajak Parkir.
  - 3) Retribusi, dirinci menjadi : (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi Perijinan Tertentu.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Jenis Pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: a) Bagian laba perusahaan milik daerah. b) Bagian laba lembaga keuangan bank. c) Bagian laba lembaga keuangan non bank. d) Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.
- d. Lain-lain PAD yang sah, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: a). Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. b). Penerimaan jasa giro. c). Penerimaan bunga deposito. d). Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. e). Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR).

## 2. Dana Alokasi Umum

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah pusat, kepada daerah diberikan dana perimbangan melauli APBN yang bersifat transper dengan prinsip *money follows function*, yaitu prinsip dimana fungsi-fungsi di tentukan terlebih dahulu, barulah ditetapkan besarnya kebutuhan keuangan bagi pelaksanaan urusan bersangkutan (Simandjuntak, 2002). Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan ini berarti bahwa DAU adalah *general purpose gran* dimana daerah berhak menentukan sendiri penggunaan alokasi dana yang mereka terima dari pemerintah pusat tersebut (Brojonegoro, 2002), maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelolah daerahnya sendiri.

Kendala umum yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi PAD yang rendah, di lain pihak, juga menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelolah keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum. Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan PAD, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya PAD (Brahmantio, 2002).

## 3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang merupakan urusan daerah.

DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko, 2002). Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

#### **4. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (dalam Darwanto dan Yustikasi, 2007) adalah proses kenaikan output perkapita. Salah satu indikasi dari kemajuan perekonomian suatu negara atau daerah adalah melalui pencapaian tingkat pertumbuhan Produk Domesti Bruto (PDB) atau *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* setiap tahun (Saragih, 2003). Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*) merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisa tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah atau negara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu wilayah tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Adisasmita (2006), menjelaskan bahwa untuk mengukur pertumbuhan ekonomi Indikator yang digunakan adalah tingkat pertumbuhan Produk Domesti Regional Bruto (PDRB).

Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi data PDRB yang ada dihitung atas dasar harga konstan, artinya pertumbuhan PDRB mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan

perekonomian pada periode tertentu, tanpa memperhitungkan tekanan inflasi PDRB selain digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, juga untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dihitung dengan menggunakan data PDRB perkapita atas dasar harga berlaku, karena pertumbuhan PDRB dapat saja terjadi tanpa memberikan dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan PDRB.

Angka pendapatan perkapita dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah. Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah dapat mempengaruhi *employment*, pendapatan dan harga. Dari segi pembelanjaan atau pengeluarannya dengan pembelian barang/jasa secara langsung akan mempengaruhi permintaan output yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan. UNDP (*United Nations Development Program*) meranking semua negara dalam skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia terendah) hingga 1 (pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan, yaitu :

- a. Usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup;
- b. Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua pertiga)

dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga);

- c. Penghasilan yang diukur dengan pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing Negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat.

Indeks tiga komponen HDI dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan antara nilai indikator dan penentu nilai minimumnya dengan perbedaan antara penentu indikator maksimum dan minimum, atau secara singkat dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X(i) = [ X(i) - X(i)_{\min} ] / [ X(i)_{\max} - X(i)_{\min} ]$$

Di mana:

$X(i)$  : indikator ke - I (I = 1,2,3) ;

$X(i)_{\max}$  : nilai maksimum  $X(i)$

$X(i)_{\min}$  : nilai minimum  $X(i)$

Berdasarkan prosedur diatas, HDI dapat dihitung dengan persamaan berikut ini:

$$\text{HDI} = 1/3 [ X(1) + X(2) + X(3) ]$$

Di mana:

$X(1)$  = Indeks harapan hidup kelahiran

$X(2)$  = Indeks pendidikan =  $2/3$  (indeks melek huruf) +  $1/3$  (indeks rata-rata lama sekolah)

$X(3)$  = Indeks standar hidup layak

Kisaran antara minimum dan maksimum indikator yang tercakup sebagai komponen HDI adalah UNSFIR, 2000 (Mudrajat Kuncoro, 1997):

Harapan hidup kelahiran : 25 – 85 (Standar UNDP)

Tingkat melek huruf : 0 – 100 (Standar UNDP)

Rata-rata lama sekolah : 0 – 15 (Standar UNDP)

Konsumsi perkapita yang disesuaikan : 300.000 – 732.720

Konsep pembangunan dalam bidang sosial ekonomi sangat beragam tergantung konteks penggunaannya. Ahli ekonomi mengembangkan teori pembangunan yang didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia di dalam proses pembangunan, yang kemudian dikenal dengan istilah *Investment in Human Capital*. Teori ini didasari pertimbangan bahwa cara yang paling efisien dalam melakukan pembangunan nasional suatu negara

terletak pada peningkatan kemampuan masyarakatnya. Selain itu dihipotesiskan pula bahwa faktor utama yang mendukung pembangunan adalah pendidikan masyarakat.

Teori human capital mengasumsikan bahwa pendidikan formal merupakan instrumen terpenting untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki produktifitas yang tinggi. Menurut teori ini pertumbuhan dan pembangunan memiliki 2 syarat, yaitu adanya pemanfaatan teknologi tinggi secara efisien, dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada.

## 6. Hubungan DAU dengan Pertumbuhan Ekonom

Hubungan DAU dengan pertumbuhan Ekonomi dapat dibuktikan dari beberapa penelitian seperti yang diungkapkan oleh Harianto (2007), bahwa sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja lebih didominasi jumlah DAU dari pada PAD (Sidik et al, 2002).

Legrenzi & Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Prakoso (2004) memperoleh temuan empiris yang menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah

daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini.

Selanjutnya, pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada Pertumbuhan Ekonomi (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003). Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Sidik (2002) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

#### **7. Hubungan PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Seperti halnya pula dengan uraian hubungan DAU dengan Pertumbuhan Ekonomi di atas, berikut dikutip sebagian dari Harianto (2007)

dimana PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu (Tambunan, 2006).

Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003). Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan secara berlebihan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Sidik (2002) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

#### **8. Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kualitas *human capital*-nya. Ada beberapa indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kualitas *human capital*, seperti IPM, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan. Ramirez dkk, (1998) menyebutkan bahwa ada hubungan timbal balik antara *human capital* dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan yang dimaksudkan oleh Ramirez dkk tersebut adalah sebagai berikut:

**Pertama** adalah dari *pertumbuhan ekonomi ke human development*. GNP mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah; *civil society* seperti melalui organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Peranan fungsi alokasi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan manusia adalah fungsi total pengeluaran sektor publik, seberapa besar alokasi pengeluaran sektor publik untuk sektor pembangunan manusia, dan bagaimana pengeluaran tersebut dialokasikan. Peranan organisasi masyarakat dan LSM memegang peranan sebagai faktor pendukung dan pelengkap di dalam pembangunan manusia.

**Kedua** adalah dari *human development* ke pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan mendorong peningkatan modal manusia, mendorong peningkatan produktifitas masyarakat (tenaga kerja), mendorong kemampuan masyarakat untuk mengadaptasi dan mempergunakan teknologi di dalam produksi serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan kapasitas dan teknikal teknologi dalam industri.

Peningkatan pembangunan manusia ini juga membutuhkan investasi yang besar dan diikuti juga dengan pemerataan distribusi pendapatan sehingga dengan investasi dan pemerataan pendapatan tersebut akhirnya akan mempermudah peningkatan pembangunan pendidikan dan kesehatan.

## 9. Hipotesis

Upaya memberikan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: “Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh penga-

rusipatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai”.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa data sekunder yang informasinya diperoleh dari BPS Kab. Sinjai dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dengan menggunakan struktur teori untuk membangun satu atau lebih hipotesis yang membutuhkan pengujian secara kuantitatif dan statistik. Metode pengukuran dengan menggunakan data realisasi APBD Kabupaten Sinjai.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai pada bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi obyek peneliti yang berada di bagian Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atas pertimbangan bahwa Kabupaten Sinjai. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data yang dapat mewakili seluruh populasi. Sedangkan Sugiono (2009) memberikan pengertian bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

### 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil publikasi berupa data mengenai laporan realisasi APBD, diperoleh melalui dokumen

laporan realisasi APBD atau laporan perhitungan APBD Kabupaten Sinjai.

- b. Data diperoleh dari BPKAD Kabupaten Sinjai tentang data laporan realisasi APBD berupa data jumlah realisasi anggaran DAU, DAK, PAD, mulai tahun anggaran 2005-2009 sedangkan data pertumbuhan ekonomi akan diperoleh pada Badan Pusat Statistik.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Telaah dokumentasi, melalui kajian literatur, dokumen-dokumen dan laporan-laporan (data DAU, PAD, dan data pertumbuhan ekonomi, serta data lain yang berhubungan dengan objek penelitian ini.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang dapat mendukung penelitian.

**6. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan cara regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y_2 = f(Y_1, x_1, x_2, x_3)$$

$$Y_2 = f(x_1, x_2, x_3)$$

$$Y_2 = \alpha_0 + \alpha_1 Y_1 + \alpha_2 x_1 + \alpha_3 x_2 + \alpha_4 x_3 + e \dots\dots\dots(1)$$

$$Y_1 = [\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \mu] \dots\dots\dots(2)$$

$$Y_2 = \alpha_0 + \alpha_1 [\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \mu] + \alpha_2 x_1 + \alpha_3 x_2 + \alpha_4 x_3 + e \dots\dots\dots(3)$$

$$Y_2 = \alpha_0 + \alpha_1 \beta_0 + \alpha_1 \beta_1 x_1 + \alpha_1 \beta_2 x_2 + \alpha_1 \beta_3 x_3 + \mu \beta_0 + \alpha_2 x_1 + \alpha_3 x_2 + \alpha_4 x_3 + e \dots\dots\dots(4)$$

- Y2 =  $\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e$
- Ket : Y1 = Pertumbuhan ekonomi (PDRB)
- Y2 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- X<sub>1</sub> = Dana Alokasi Umum(DAU)
- X<sub>2</sub> = Dana Alokasi Khusus (DAK)
- X<sub>3</sub> = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b<sub>0</sub> = Konstanta (intercept)
- b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> = Koefisien regresi (parameter)
- E = Faktor kesalahan

**7. Definisi Operasional**

Dalam analisa ini variabel dependen (Y) adalah Indeks Pembangunan Manusia yang ditun-

jukan oleh perubahan indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan sosial ekonomi. Adapun variabel independennya adalah (X<sub>1</sub>), DAU (X<sub>2</sub>), DAK (X<sub>3</sub>) PAD. definisi operasional masing-masing variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi adalah PDRB Kabupaten Sinjai per tahun (atas dasar harga konstan tahun 2005), diukur dalam jutaan rupiah.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah total realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeloan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan PAD yang sah.
3. DAU, Total dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan menggunakan skala rasio.
4. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
5. Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu indikator yang menggambarkan penca-paian pembangunan manusia disuatu negara yang dinyatakan dalam 3 (tiga) dimensi yaitu lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup, pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, dan standar hidup yang diukur dari pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan (*Purchasing Power Parity Rupiah*).

#### D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

##### 1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia

Dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif, salah satu komponen yang diandalkan dan merupakan variabel yang signifikan adalah DAU untuk belanja modal dan PAD. Semakin tinggi tingkat tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Upaya yang paling ambisius dan terbaru dalam menganalisa perbandingan status pembangunan sosial ekonomi baik di NSB maupun negara maju telah dilakukan oleh UNDP secara sistematis dan komprehensif. UNDP menerbitkan seri tahunan dalam publikasi berjudul *Human Development Reports*. Selanjutnya disajikan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2005-2009 di Kabupaten Sinjai.

Tabel 2. Perkembangan PDRB Kabupaten Sinjai Persemester dari Tahun 2005-2009

Tahun per semester	PDRB	Pertumbuhan
2005 (1)	239.005,52	1,94
2005 (2)	557.679,54	3,29
2006 (1)	346.592,11	2,51
2006 (2)	498.754,49	3,60
2007 (1)	383.253,16	2,33
2007 (2)	508.033,25	3,09
2008 (1)	402.239,43	3,13
2008 (2)	555.473,49	4,32
2009 (1)	450.963,49	3,09
2009 (2)	573.953,54	3,93

Sumber : BPS Kab.Sinjai 2005-2009

Gambaran besarnya Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah yang dialokasikan

melalui APBD Kabupaten Sinjai tertera pada Table 3.

Tabel 3. Perkembangan penerimaan PAD, DAU dan DAK Kabupaten Sinjai Persemester dari tahun 2005-2009.

Tahun per semester	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Khusus (DAK)
	Rp.	Rp.	Rp.
2005 (1)	4.689,6	58.208,8	7.493,1
2005 (2)	7.034,4	87.313,2	17.483,9
2006 (1)	6.665,1	128.116,4	26.256
2006 (2)	10.424,9	156.586,7	39.384
2007 (1)	7.670,3	22.753,4	22.753
2007 (2)	9.374,8	27.809,7	27.809,7
2008 (1)	6.724,4	12.780,5	24.735,6
2008 (2)	10.086,6	15.620,6	37.103,4
2009 (1)	5.556,2	124.168,1	23.731,7
2009 (2)	6.790,6	164.594,9	29.005,4

Sumber Bagian Keuangan, 2010

Dari di atas memperlihatkan bahwa DAU mengalami peningkatan dari tahun 2005-2007 dan mengalami penurunan tahun 2008 -2009, dengan rata-rata pertumbuhan 2005-2007 sebesar 4,6 %. DAU terutama Tahun 2005-2009 memperlihatkan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Walaupun PAD sempat mengalami penurunan ditahun 2005 sebesar 2,59 % namun tahun 2006-2007 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, besarnya proporsi DAU dibanding PAD memberikan satu petunjuk bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh posisi anggaran pemerintah pusat. Ini sejalan dengan pendapat Adi (2005), bahwa proporsi DAU terhadap penerimaan Daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain termasuk PAD.

Bilamana dihubungkan Tabel 1 dan 2 terlihat dengan jelas bahwa DAU, PDRB mengalami kenaikan selama tahun 2005-2008, sementara pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PAD mengalami fluktuasi atau naik turun.

Tabel 4. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sinjai Se Sulawesi Selatan Tahun 2005-2009.

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009
Sinjai	67,1	67,5	68,3	68,7	69,2
Sulawesi Selatan	17	18	18	18	19

Sumber: BPS Kabupaten Sinjai 2005-2009

Model pembangunan manusia telah menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah dari rakyat (*of people*), untuk rakyat (*for people*), dan oleh rakyat (*by people*). Pembangunan dari rakyat mengandung makna pemberdayaan yaitu peningkatan kapabilitas melalui pendidikan, pelatihan, pemeliharaan kesehatan yang lebih baik, perumahan layak huni dan perbaikan gizi. Pembangunan untuk rakyat berarti hasil pembangunan benar-benar diterima semua rakyat secara asil. Pembangunan oleh rakyat berarti rakyat harus ikut mengambil bagian dan berperan aktif dalam pembangunan, bukan sebagai penonton dan penerima hasil pembangunan.

Dua hal yang ditekankan pada pembangunan manusia yaitu; (1) peningkatan kapabilitas atau pemberdayaan dan (2) penciptaan peluang. Antara kapabilitas dan peluang harusimbang. Bila kapabilitas berhasil ditingkatkan melalui pembangunan SDM, namun tidak ada peluang atau sebaliknya bila peluang telah tercipta tapi tidak ditopang oleh kemampuan SDM maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik.

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas SDM dan partisipasi dalam pembangunan. Perbandingan antar indikator komponen IPM merupakan tinjauan parsial, tingkat keberhasilan pembangunan baru di-

kur dari satu komponen saja. Adanya indikator tunggal IPM merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia.

IPM Kabupaten Sinjai pada tahun 2008 sekitar 68,24 kemudian sedikit mengalami pergeseran menjadi 68,74 pada tahun 2009. Posisi IPM Kab. Sinjai pada tahun 2009 berada pada peringkat ke-18 dari 24 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan, sedangkan posisi pertama adalah Kota Makassar (77,92) dan posisi terakhir Kab. Jeneponto (64,04). Sedangkan pada tahun sebelumnya, posisi IPM Kab. Sinjai berada di peringkat yang sama yaitu peringkat ke 17 dari 23 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan. Sebagai gambaran bahwa pada tahun 2009 IPM Sulawesi Selatan sekitar 70,22.

Berdasarkan kriteria UNDP nilai IPM kurang dari 51 digolongkan sebagai IPM sedang, nilai IPM antara 51 sampai dengan 79 (51-79) digolongkan sebagai IPM menengah dan nilai IPM di atas 79 (>79) digolongkan tinggi. Dengan demikian sesuai dengan kriteria tersebut, IPM Kab. Sinjai tergolong IPM menengah, baik IPM pada tahun 2008 maupun IPM pada tahun 2009.

Sebelum pembahasan mengenai perbandingan IPM antar waktu, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai keadaan dari masing-masing indikator pembentuk IPM sebagai berikut.

#### a. Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia

Model pembangunan yang memiliki konsep yang lebih luas mengenai pilihan-pilihan manusia yang sangat tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu. Ada 3 pilihan yang sangat esensial untuk dipenuhi yaitu; (1) pili-

han untuk hidup sehat dan berumur panjang, (2) pilihan untuk memiliki ilmu pengetahuan, dan (3) pilihan untuk mempunyai akses ke berbagai sumber. Ketiga pilihan mendasar ini dapat terpenuhi maka seseorang akan mudah meningkatkan kemampuannya dalam aktifitas sehari-hari serta memiliki kemampuan pula untuk meraih pilihan-pilihan lain yang juga tidak kalah pentingnya.

Ketiga pilihan yang esensial tersebut di atas dapat tercermin dari komponen-komponen indeks pembangunan manusia sebagai berikut:

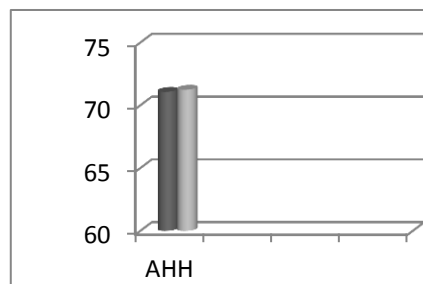
### 1) Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan diwakili dengan Angka Harapan Hidup ( $e_0$ ) diharapkan dapat mencerminkan pembangunan manusia di bidang kesehatan. Pada tahun 2007 indeks Kesehatan Kab. Sinjai tercatat sekitar 76,8 dan pada tahun 2008 menjadi sekitar 77,1. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Sinjai relatif lebih baik dalam kurun waktu 2007-2008. Sementara itu, indeks kesehatan Kab. Sinjai tahun 2008 lebih tinggi dibanding dengan indeks kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2008 yang berkisar sekitar 74,33.

Menurut UU Kesehatan Indonesia tahun 1992, kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Agar dapat dicapai derajat kesehatan

#### a) Angka Harapan Hidup

Gambar 1. Angka Harap Hidup Kabupaten Sinjai Tahun 2008 dan 2009



yang tinggi, penduduk juga harus mendapatkan hak-haknya atas kecukupan dalam memperoleh makanan, air minum, pakaian, pemukiman, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk. Disamping itu, setiap individu bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Kemajuan dalam pembangunan kesehatan akan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan nasional dan sebaliknya pembangunan nasional akan mempunyai dampak penting terhadap derajat kesehatan penduduk.

Pada hakekatnya derajat kesehatan penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor perilaku masyarakat, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi perlu dijalankan antar intersektoral dengan menyertakan peran serta masyarakat dan swasta.

Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat dari derajat kesehatan dan gizi penduduk, meningkatnya pelayanan kesehatan, dan bertambah baiknya lingkungan kesehatan masyarakat.

Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami kenaikan dari 71,07 tahun 2008 menjadi 71,24 tahun pada tahun 2009 (Gambar 1). Sedangkan AHH Sulawesi Selatan tahun 2009 sekitar 69,60 tahun yang berarti lebih rendah dari AHH Kab. Sinjai. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kesehatan masyarakat Kab Sinjai lebih baik dibandingkan tingkat kesehatan masyarakat Sulawesi Selatan secara keseluruhan.

Besar kecilnya AHH dipengaruhi oleh banyak endogen maupun eksogen. Pengaruh variabel tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dapat seketika maupun dengan tenggang waktu tertentudan bekerja secara tersendiri maupun bersinergi dengan variable lain. Sementara itu, masih terdapat beberapa variable yang diperkirakan berpengaruh terhadap AHH/e<sub>o</sub>. Secara umum diharapkan bahwa dengan semakin tingginya persentase balita yang ditolong kelahirannya oleh tenaga medis semakin tinggi kemungkinan kelangsungan hidupnya. Tetapi perkiraan hubungan tersebut dapat menyimpang jika pertolongan tenaga medis digunakan untuk proses kelahiran yang abnormal dan dengan penanganan yang sudah terlambat. Data susenas menunjukkan bahwa persalinan yang ditolong oleh tenaga medis di Kab. Sinjai pada tahun 2008 hanya sekitar 44,14 persen sedikit mengalami kenaikan menjadi 47,56 persen pada tahun 2009 dari seluruh kasus kelahiran.

#### **b) Pemerataan Pelayanan Kesehatan**

Fasilitas yang tersedia tanpa didukung tenaga yang mengerti di bidangnya tentunya akan kurang bermakna, begitu juga sebaliknya tenaga yang tersedia tanpa fasilitas yang memadai akan mendapatkan hasil yang kurang optimal. Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan terhadap

masyarakat disamping telah tersedianya Rumah Sakit Umum yang berada di ibu kota Kab Sinjai, pada tahun 2008 terdapat 15 buah Puskesmas yang tersebar di 9 kecamatan. Untuk menjangkau semua penduduk dalam wilayah kerja masing-masing rasanya agak sulit dilakukan oleh Puskesmas. Oleh sebab itu harus ditunjang dengan fasilitas layanan kesehatan yang disebut Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling (Puskel).

Pada tahun 2008 dan 2009 Pustu di Kab. Sinjai telah berdiri 63 buah. Sementara itu, pada tahun 2008 terdpt 16 buah Puskel dan pada tahun 2009 bertambah menjadi 17 Puskel. Keberadaan Pustu dan Puskel ini sangat berarti sekali dalam rangka pemerataan kesehatan di tengah-tengah masyarakat.

Rasio penduduk puskesmas (termasuk Pustu dan Puskel) pada tahun 2007 adalah sekitar 2.377, yang berarti dari setiap 2.377 orang terdapat satu Puskesmas (termasuk Pustu dan Puskel). Sedangkan rasio penduduk-puskesmas pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 2.378. ini berarti dari setiap 2.378 orang terdapt satu Puskesmas (termasuk Pustu dan Puskel).

Tenaga kesehatan yang selanjutnya disebut tenaga medis (SI) dan paramedik (SPK, AKPER, APK) di Kab. Sinjai secara keseluruhan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, yaitu dari 370 orang pada tahun 2008 menjadi 183 orang pada tahun 2009. Sementara itu, tenaga medis dokter (dokter ahli, dokter umum dan dokter gigi) pada tahun 2007 berjumlah 46 orang, kemudian berkurang menjadi 29 orang pada tahun 2008. Begitu juga untuk tenaga medis bidan mengalami penurunan dari 77 orang pada tahun 2007 menjadi 60 orang pada tahun 2009.

Dengan demikian pada tahun 2008 dari 4.859 orang penduduk terdapat seorang dokter dan naik menjadi 7.791 orang per dokter pada tahun 2009. Sementara itu, pada tahun 2008, dari 604 orang terdapat satu tenaga paramedis dan pada tahun 2009 dari 1.234 orang terdapat satu tenaga paramedis.

**c) Status Kesehatan Masyarakat**

Data Susenas menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Kabupaten Sinjai sekitar 34,14persen pada tahun 2008, kemudian menjadi 25,19 persen dari total penduduk pada tahun 2009. Menurunnya persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat di Sinjai semakin lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Sementara kalau dilihat dari jenis kelamin menunjukkan bahwa persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi dibanding dengan penduduk laki-laki. Pada tahun 2008, persentase laki-laki yang mengeluh sekitar 32,74 persen dari jumlah penduduk, sedangkang perempuan sekitar 35,39 persen. Selanjutnya pada tahun 2009, penduduk laki-laki mengeluh sekitar 24,19 persen, sedangkan perempuan sekitr 26,13 persen terhadap total penduduk perempuan.

Tabel 5. Persentase Penduduk Yang Mengeluh Sakit Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Sinjai Tahun 2008 dan 2009

Jenis Kelamin	Yang Mengeluh (%)	
	2008	2009
Laki-laki	32,74	24,19
Perempuan	35,39	26,13
<b>Laki-laki + Perempuan</b>	<b>34,14</b>	<b>25,19</b>

**d) Peningkatan Peran Serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan diarahkan melalui 3 kegiatan yaitu; *kepe-mimpinan* adalah melakukan intervensi kepemimpinan yang berwawasan kesehatan, *pengorganisa-sian* yaitu melakukan intervensi di bidang kesehatan pada setiapkelompok masyarakat sehingga muncul usaha kesehatan bersama masyarakat (UKBM), *pendanaan* yaitu mengembangkan sumber dana yang ada untuk membiayai pelayanan dasar dan lanjutan atau rujukan terutama di rumah sakit umum daerah bagi seluruh masyarakat, yang pada tahun 2005 melalui peraturan daerah no. 3 telah ditetapkan program jaminan kesehatan dan dokter keluarga, dan sedang berkembang saat ini dikenal dengan Jaminan Kesehatan Daerah.

Peningkatan peran serta masyarakat secara kasar dapat dilihat dengan melihat keberadaan jenis UKBM misalnya Posyandu, Polindes, POD (Pos Obat Desa) BKM (Bina Keluarga Balita). Namun karena keterbatasan data pada tulisan ini hanya dapat disampaikan keberadaan Posyandu dan Polindes di Kab. Sinjai.

Di Kab. Sinjai terjadi peningkatan jumlah posyandu pada kurun waktu 2008 sampi 2009 yaitu 303 buah pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 menjadi sebanyak 309 buah, disamping tenaga kesehatan kader binaan Posyandu memegang peranan yang sanagt penting bagi kelangsungan posyandu. Banyaknya kader menunjukkan betapa pedulinya penduduk terhadap lingkungan di tempat ia tinggal.

Kader masyarakat yang paling terkait dengan pelayanan di Polindesadalah dukun bayi. Oleh sebab itu, Polindes salah satu perannya adalah sarana untuk meningkatkan kemitraan antara

bidan dan dukun bayi dalam menolong persalinan. Data dari Dinas Kesehatan Kab. Sinjai menunjukkan bahwa persentase persalinan yang ditolong oleh dukun bayi yang terlatih di Kab. Sinjai pada tahun 2009 yaitu sebesar 10,29 persen (460) persalinan. Persentase ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu yang 7,67 persen dengan jumlah persalinan sebesar 303 orang persalinan. Sedangkan persentase persalinan yang ditolong bidan pada tahun 2008 sebesar 92,33 persen dan pada tahun 2009 persentasenya mengalami penurunan menjadi 89,70 persen total sebelumnya.

## **2) Indeks Pendidikan**

Indeks pendidikan di Kab. Sinjai selama periode 2008-2009 relatif sama yaitu sebesar 72,34. Komponen angka melek huruf juga relatif sama yang sebesar 86,44 persen pada tahun 2008 dan 2009. Kemudian rata-rata lama sekolah juga relative sama yaitu 6,6 tahun pada tahun 2008 dan sebesar 6,6 tahun pada tahun 2009. Indeks ini masih lebih rendah dibanding dengan indeks pendidikan Sulawesi Selatan yaitu 73,75 pada tahun yang 2009. Melihat kondisi ini, tampaknya peran serta masyarakat di sektor pendidikan di daerah ini masih perlu mendapat perhatian, terutama karena adanya kemudahan berupa pembebasan biaya sekolah SD hingga SLTA dari Pemerintah Kab. Sinjai.

Program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa, ekonomi dan sosial. Sehingga keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu parameter untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kab. Sinjai sangat konsisten dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan yang bertumpu pada strategi 3

pilar pembangunan yang salah satunya adalah pendidikan. Sejak tahun 2004, pemerintah Kab. Sinjai telah membebaskan biaya pendidikan sekolah dasar dan sekolah tingkat lanjutan per-tama. Pada tahun 2008 telah diperluas hingga tingkat sekolah lanjutan tingkat atas.

### **a) Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Di Kab. Sinjai pada kurun waktu 2008 dan 2009 rasio murid guru SD mempunyai besaran yang relatif sama yaitu sekitar 13, ini berarti ada sekitar 13 murid SD yang harus ditangani oleh seorang guru pada suatu tempat dia mengajar. Berbeda halnya dengan rasio murid guru SLTP, yaitu dari 13 murid setiap guru pada tahun 2008 turun menjadi 12 pada tahun 2009. Sementara itu, rasio murid guru SMU dari 10 siswa pada kurun waktu 2008-2009 relatif sama yaitu sekitar 11. Ini berarti ada sekitar 11 murid SMU yang harus ditangani oleh setiap guru pada sebuah sekolah tempat dia mengajar.

Rasio murid sekolah SD di Kab. Sinjai pada tahun 2008 sekitar 135 murid persekolah, dan tahun 2009 mengalami perubahan menjadi 187 murid persekolah. Demikian juga rasio murid pada SLTP mengalami penurunan dari 342 siswa persekolah pada tahun 2007 menjadi 231 siswa pada tahun 2009. Sementara itu, rasio siswa SMU dari 108 pada tahun 2008 naik menjadi 415 siswa pada tahun 2009.

### **b) Tingkat Pendidikan**

#### **(1) Angka Melek Huruf**

Angka melek huruf (AMH) Kab. Sinjai tergolong masih rendah. Hal ini terlihat pada tahun 2008 penduduk yang bisa baca tulis sekitar 86,44 persen dari total umur 10 tahun ke atas, kemudian pada tahun 2009 juga relative sama yaitu sekitar

86,44 persen. Angka melek huruf di Kab. Sinjai perlu mendapat perhatian karena masih rendahnya kemampuan membaca baik laki-laki maupun perempuan. Angka buta huruf di daerah ini relatif masih tinggi yaitu 13,6 persen.

**(2) Rata-rata lama sekolah**

Indikator ini dapat memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk. Rata-rata lama sekolah penduduk Kab. Sinjai yang berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2008 dan 2009 relatif sama yaitu sekitar 6,62 persen. Melihat angka tersebut mak dapat dikatakan bahwa pada tahun 2008 tingkat pendidikan penduduk rata-rata baru menyelesaikan pendidikan pada tingkat sekolah dasar dan pada tahun 2009 tidak mengalami perubahan. Angka ini jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan maka baik tahun 2008 maupun 2009 merupakan angka di bawah rata-rata. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat di bidang pendidikan di Kab. Sinjai masih perlu ditingkatkan lagi.

**(3) Pendidikan tertinggi yang ditamatkan**

Potensi SDM di suatu daerah dapat dilihat dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk. Meningkatnya tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk berarti meningkat pula SDM yang selanjutnya dapat dijadikan ukuran keberhasilan baik dari sudut sosial maupun ekonomi.

Berdasarkan data hasil susenas penduduk Kab. Sinjai, penduduk umur 10 tahun ke atas yang berpendidikan SLTP ke atas sekitar 33,72 persen kemudian turun menjadi sekitar 28,54 persen pada tahun 2009. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Sinjai Tahun 2008 dan 2009

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Tidak Punya SD/Sederajat	38,39	41,78
SLTP/ Sederajat	27,88	29,69
SMU/ Sederajat	13,21	13,48
Perguruan Tinggi	14,42	10,54
	6,09	4,53

**(4) Tingkat partisipasi sekolah**

Gambaran secara umum mengenai banyaknya kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah tanpa memandang atau tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti adalah angka partisipasi sekolah (APS).

APS untuk usia sekolah dasar di Kab. Sinjai mengalami kenaikan antara kurun waktu 2008-2009. Pada tahun 2008 APS SD (7-12) sekitar 94,57 relatif naik menjadi sekitar 94,79 persen pada tahun 2009. Kemudian APS Sekolah Lanjutan Pertama meningkat dari 72,76 menjadi 73,32. Sementara APS Sekolah Lanjutan Tingkat Atas mengalami penurunan sekitar 0,09 poin dari tahun 2008 ke atas tahun 2009. Selanjutnya APS untuk umur 19-24 (D1-S1) mengalami kenaikan dari 3,95 persen pada tahun 2008 menjadi 5,06 persen pada tahun 2009.

Tabel 7. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah (7-24 Tahun), di Kabupaten Sinjai Tahun 2008 dan 2009

<b>Penduduk Usia Sekolah</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
7-12	94,57	94,79
13-15	72,76	73,32
16-18	45,64	45,55
19-24	3,95	5,06

Sumber: BPS Kabupaten Sinjai

**c) Perumahan**

Di dalam rumah manusia didik dan dibentuk dan berkembang menjadi manusia yang berkeperi-

badian dalam makna yang lebih luas. Kondisi perumahan dan lingkungan yang mencerminkan kondisi penduduk yang tinggal dari perumahan dan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, laporan terhadap kondisi perumahan dan lingkungan adalah merupakan bagian dari laporan pembangunan manusia. Gambaran kondisi perumahan dan lingkungan tidak hanya dilihat secara fisik saja tetapi juga dilihat dari akses penghuni rumah tersebut ke berbagai fasilitas seperti air bersih, penggunaan jamban, listrik dan sebagainya.

**(1) Kondisi Fisik Tempat Tinggal**

Kenyamanan tempat tinggal tidak bisa lepas dari luas lantai yang digunakan, dilihat dari segi luas lantai perumahan di Kab Sinjai sedikit membaik. Ini tercermin dari makin menurunnya persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai 49 meter persegi ke bawah yaitu sekitar 17,90 persen rumah tangga pada tahun 2008 menjadi 17,44 persen pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2008 rumah tangga di Kab. Sinjai yang menempati rumah dengan luas lantai 50-99 meter persegi sekitar 62,73 persen, kemudian pada tahun 2009 bertambah menjadi 66,33 persen. Sementara itu, rumah tangga yang menempati luas lantai 100 meter persegi ke atas pada tahun 2008 sekitar 19,37 persen mengalami penurunan menjadi 16,24 persen pada tahun 2009.

Tabel 8. Persentase Rumahtangga menurut Luas Lantai (m<sup>2</sup>) di Kabupaten Sinjai Tahun 2008 dan 2009

Luas Lantai	2008	2009
< 20	1,30	1,21
20-49	16,60	16,23
50-99	62,73	66,33
> 100	19,37	16,24
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sinjai

**(2) Fasilitas Tempat Tinggal**

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat program pengadaan listrik belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan rumah tangga. Akibatnya secara relatif persentase rumah tangga pemakaian listrik mengalami penurunan dari tahun 2008 ke tahun 2009 yaitu dari 75,56 persen menjadi 72,48 persen.

Sumber air minum merupakan indikator penting untuk mengukur derajat kesejahteraan keluarga. Air bersih adalah sumber air minum yang berasal dari PAM, pompa sumber terlindung, mata air terlindung dan air kemasan. Pada tahun 2008 rumah tangga Kab. Sinjai yang menggunakan air bersih sekitar 65,97 persen dan naik menjadi 72,14 persen pada tahun 2009 sedangkan rumah tangga yang menggunakan bukan air bersih yaitu sekitar 34,03 persen pada tahun 2008 turun menjadi 27,86 persen pada tahun 2008. Sumber air minum tidak bersih berasal dari sumber tidak terlindung, mata air tidak terlindung, sungai, danau/waduk dan air hujan. Tabel 7 Persentase Rumah tangga menurut Sumber Air Minum dan Sumber Penerangan di Kabupaten Sinjai Tahun 2008 dan 2009.

Tabel 9. Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum dan Sumber Penerangan di Kab. Sinjai Tahun 2008 dan 2009

Fasilitas Perumahan	2008	2009
Sumber Air Minum		
Air bersih	65,97	72,14
Bukan air bersih	34,03	27,86
Jumlah	100,00	100,0
Sumber Penerangan		
Listrik	75,56	72,48
Non listrik	24,44	27,52
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: BPS BPS Kabupaten Sinjai

#### d) Indeks Paritas Daya Beli

Komponen *Purchasing Power Parity* atau dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak. Pengguna PDRB rii; perkapita ini karena data yang ideal (modul konsumsi susenas) belum sampai estimasi kabupaten/kota. Namun dengan asumsi bahwa PDRB Kab. Sinjai dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk, maka dianggap masih relevan dengan tingkat pendapatan sebagai indikator standar hidup layak. Daya beli penduduk Kab. Sinjai pada tahun 2008 sekitar 600,64 ribu rupiah dan pada tahun 2009 bergerak naik menjadi 605.880.000 rupiah. Sementara itu, rata-rata daya beli penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2009 sekitar 630,81 ribu rupiah. Selanjutnya indeks PPP di Kab Sinjai sekitar 55,6 pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 menjadi 56,81.

## 2. Hasil Estimasi

### Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Analisis tentang pengaruh PAD, DAU dan DAK melalui pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh PAD, DAU dan DAK melalui pertumbuhan ekonomi (Y1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y2) di Kab. Sinjai. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka dilakukan estimasi model *TwoStage Leas Squares Analysis* dengan menggunakan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) *For Windows* versi 16.0.

Berdasarkan perhitungan dari persamaan sebagai berikut :

$$Y2 = \beta_0 + \beta_1X1 + \beta_2X2 + \beta_3X3 + \epsilon$$

$$Y2 = 0,450 + 0,036X1 + 0,122X2 + 0,027X3$$

$$R = 0,940$$

$$R \text{ Square} = 0,883$$

$$\text{Adjusted R Square} = 0,824$$

$$F = 15,061$$

Persamaan regresi di atas terdapat nilai  $\beta_0$  atau nilai konstanta sebesar 0,940. Hal ini menunjukkan bahwa jika variable independen seluruhnya dianggap bernilai 0, maka pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,940. Selain itu persamaan regresi di atas, terdapat nilai koefisien regresi variabel prediktor dan instrumental (PAD, DAU, dan DAK) dan Instrumental (Pertumbuhan Ekonomi) adalah positif. Nilai koefisien PAD, DAU dan DAK, Pertumbuhan Ekonomi yang positif artinya apabila terjadi perubahan pada variable PAD, DAU dan DAK, melalui Pertumbuhan Ekonomi akan menyebabkan perubahan searah pada variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia).

Hasil koefisien regresi pada PAD sebesar 0,036 dengan nilai signifikansi 0,498 dan nilai t sebesar 0,722 ini menjelaskan bahwa variabel PAD tidak pengaruh terhadap IPM melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kab Sinjai. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Maruddin, (2009) yang menganalisis pengaruh DAU dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab Enrekang dengan kesimpulan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian Trianto, (2007) yang meneliti analisa pengaruh PAD dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap PDRB di Propinsi Jawa Timur, menyimpulkan bahwa PAD dan Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

Nilai koefisien regresi 0,122 dengan nilai signifikansi 0,001 (kurang dari 0,05) dan nilai t

sebesar 6,420 ini menjelaskan bahwa variabel DAU mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi Kab Sinjai dimana jika DAU naik sebanyak 1 Persen maka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sinjai akan naik berkisar sebesar Rp. 0,122 dan sebaliknya jika DAU naik sebanyak 1 Persen maka Pertumbuhan Ekonomi Kab. Sinjai akan turun pula berkisar sebesar Rp. 0,122 dengan tingkat signifikansi 0,001 dengan asumsi variabel lain konstan/tetap.

Dengan kata lain bahwa semakin meningkat DAU akan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi Kab. Sinjai semakin meningkat pula, dan sebaliknya semakin menurun DAU akan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi Kab. Sinjai semakin menurun pula. Dari hasil perbandingan antara  $t$  hitung dengan  $t$  tabel dimana  $t$  hitung = 6,420 >  $t$  tabel = 1,812 maka Hipotesis Nol ( $H_0$ ) ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi Kab. Sinjai. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian penelitian Nurlia Maruddin, (2009) yang menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Enrekang dengan kesimpulan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian Trianto, (2007) yang meneliti Analisa Pengaruh PAD dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap PDRB di Propinsi Jawa Timur, menyimpulkan bahwa PAD dan Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

Nilai koefisien regresi 0,027 dengan nilai signifikansi 0,239 dan nilai  $t$  sebesar 1,306 ini menjelaskan bahwa variabel DAK tidak pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sinjai. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian penelitian Budi D. Sinullingga (2009) berjudul Analisis Pengaruh Alokasi Sektor Anggaran Pemerintah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kota Medan), berkesimpulan bahwa sektor yang secara langsung menangani komponen peningkatan IPM yaitu sektor pendidikan dan kesehatan kurang efektif meningkatkan IPM.

Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi ( $R$ ) sebesar 0,940 atau dapat diartikan mendekati 1, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen tingkat keeratannya adalah sangat kuat, yang dapat diartikan bahwa PAD, DAU dan DAK melalui pertumbuhan ekonomi ( $Y$ ) mempunyai hubungan yang erat dengan Indeks Pembangunan Manusia ( $Y_2$ ) di Kabupaten Sinjai.

Koefisien determinasi (*Squared Multiple Correlations* =  $R^2$ ) adalah 0,883 yang menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU dan DAK melalui pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) dapat menjelaskan 88,3% variasi tinggi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia ( $Y_2$ ) selebihnya (11,7%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam persamaan regresi yang digunakan.

Untuk menguji keberartian dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat melalui pengujian statistik uji  $F$  atau uji ANOVA dan membandingkan antara  $F$  hitung dengan  $F$  tabel. Dari hasil analisis diperoleh nilai  $F$

hitung sebesar 15,061 dengan tingkat signifikan sebesar 0,003, jika dibandingkan dengan nilai F tabel 3,71, maka F hitung (15,061) > F tabel (3,71). Dengan menggunakan signifikan dengan taraf  $\alpha = 0,10$  (10%), probabilitas (0,003) lebih kecil dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU dan DAK melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kab. Sinjai.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK melalui pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam peningkatan IPM Kab. Sinjai. IPM merupakan satu ukuran yang dapat mencerminkan aspek-aspek pembangunan dan dianggap cukup baik untuk menggambarkan aspek sosial maupun ekonomi yang telah dicapai oleh suatu daerah. IPM Kab Sinjai sedikit mengalami peningkatan selama kurun waktu 2008-2009 yaitu dari 68,74 pada tahun 2008 menjadi 69,21 pada tahun 2009. Hal ini merupakan akibat naiknya sebagian indeks yang berpengaruh terhadap besaran IPM, yaitu PAD, DAU dan DAK melalui Pertumbuhan Ekonomi yang mampu menarik naik besaran IPM Kab. Sinjai.

## E. PENEUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- PAD berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi sehingga belum mampu sepenuhnya mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kab Sinjai.
- DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sehingga

mampu mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Sinjai.

- DAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Sinjai.
- PAD, DAU, dan DAK berkontribusi positif dan signifikan terhadap IPM melalui Pertumbuhan Ekonomi.

## 2. Saran

- Pemerintah Kab. Sinjai dalam hal peningkatan PAD harus membuka peluang, dengan pendapatan yang baru dengan kondisi atau potensi daerahnya baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengolahannya. Agar pemerintah daerah tidak tergantung terhadap dan transpar. Sehingga dapat meningkatkan IPM melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Sinjai.
- Pemerintah perlu melakukan berbagai program baik yang sifatnya promotif, preventif maupun kuratif antara lain melalui pendidikan kesehatan, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi dan pelayanan kesehatan. Peningkatan angka Melek Huruf dengan upaya pemberantasan buta aksara melalui Kejar Paket A yang ditindak lanjuti dengan pembentukan kelompok pembaca dan penyediaan perpustakaan keliling. Dengan demikian angka Melek Huruf di Kab ini dapat ditingkatkan yang pada akhirnya terbebas dari buta huruf.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2005. *"Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa*

- Bali)". Jurnal Studi Pembangunan KRITIS. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan 2001, *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001*.
- Baum, Warren C. dan Tolbert, Stokes M., 1988, *Investasi dalam Pembangunan* (terjemahan), Universitas Indonesia, Jakarta.
- Brahmanto, Isdijoso, 2002, "*Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)*," Kajian Ekonomi Dan Keuangan Vol. 6 No. 1.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Darwanto, dan Yustikasi, Yulia, 2007, "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*," Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar 26-28 Juli 2007.
- Halim, Abdul, 2002, "*Akuntansi sector Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*", Jakarta: Salemba Empat.
- Harianto, David dan Adi, Priyo Hari, 2007, "*Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita*," Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar 26-28 Juli 2007.
- Ida Bagus Raka Surya Atmaja. 2001. "*Peranan Investasi Swasta, Investasi Sektor Publik Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Bali Dari Tahun 1995-2000*". Tesis MEP (tidak dipublikasikan).
- Ismerdekaningsih, Herlina, SE & Endah Sri Rahayu, SE. 2002. "*Analisis Hubungan Penerimaan Pajak Terhadap Product Domestic Broto Di Indonesia (Studi Tahun 1985-2000)*". ITB Central Library.
- Kuncoro, Mudjarat. Ph.D. 2004. "*Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Mahi, B. Raksaka dan Ardiansyah, 2002, "*Sejarah Transfer Keuangan Pusat Ke Daerah*".
- Mahi, Raksaka, 2000, "*Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi penerimaan Anatar Daerah dan Peningkatan Efisiensi*", Analisis CSIS, XXXIX, No.1, 58-59.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andt: Yogyakarta.
- Mudrajat Kuncoro, 2006, "*Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*" 2006.
- Nanga, Muana. 2005. Analisis Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di NTT: Adakah Posisi Fiskal Lebih Baik. Jurnal Studi Pembangunan KRITIS. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Prakoso, KesitBambang, 2004, "*Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empiric di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*", JAAI, Vol. 8 No.2, 2004.
- Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. 2010. "*Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Tesis*". Makassar. PPS UNHAS.
- Republik Indonesi, 2004, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah", Jakarta.
- Republik Indonesi, 2004, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah", Jakarta.
- Rosyadi, Imron 2000. "*Hubungan Pengeluaran Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi*", Tesis MEP (tidak dipublikasikan).
- Said Abdullah., 2001: "*Peranan Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*" Tesis MEP (tidak dipublikasikan).
- Sidik, Mahfud, Mahi, Raksaka, Simanjuntak, Robert dan Brojonegoro, Bambang, 2002, "*DAU, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*", LPEM FE UI, Dirjen PKPD, KOMPAS, Jakarta.
- Tambunan, Tulus, 2006. "*Upaya-Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*". [www.Kardin-Indonesia.or.id](http://www.Kardin-Indonesia.or.id).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wong, Jonh D. 2004 "*The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on local Government Capacity*". Journal of Public bugeting, Accounting and Financial Management. Fall. 16.3. 799-816.